

Universitas Ngudi Waluyo
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora
Skripsi Januari 2023
Fitria Annisa
114191005

**TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Penetapan
Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

ABSTRAK

Sebagai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang tidak mengakui keabsahan pernikahan beda agama. Akibatnya, perkawinan beda agama bukan lagi merupakan fenomena baru dan sekarang diakui sebagai masalah sosial yang besar. Penulis meneliti pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara permohonan izin perkawinan beda agama dengan menggunakan teknik yuridis normatif. Bagaimana Keabsahan Pengaturan Pernikahan Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pengaturan Pernikahan berdasarkan Hukum Islam, serta bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama. Menurut pandangan penulis, hakim telah menjelaskan bahwa ada aturan hukum yang tidak menerima keabsahan perkawinan beda agama. Namun, hakim tidak mempertimbangkan implikasi perkawinan beda agama dari sudut pandang filosofis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang digunakan sebagai pertimbangan hukum tidak menjelaskan keabsahan perkawinan sebagai salah satu komponen upacara keagamaan untuk memberikan kepastian hukum. Putusan hakim dalam perkara ini hanya efektif dalam menjalankan program persidangan dengan menolak dalil-dalil agama dari lembaga agama yang dapat membuat masyarakat kurang taat menjalankan agamanya.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Nikah Beda Agama, Pertimbangan Hukum

Ngudi Waluyo University
Study Program of Legal, Faculty of Economics, Law and Humanities
Final Project Januari 2023
Fitria Annisa
114191005

JURIDICAL REVIEW OF DIFFERENT AGE MARRIAGE (Study of the Stipulation of the Supreme Court Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

ABSTRACT

As a predominantly religious country, marriage in Indonesia is regulated by Law No. 1/1974, which does not recognize the validity of interfaith marriages. As a result, interfaith marriage is no longer a new phenomenon and is now recognized as a major social problem. The author examines the legal considerations made by the judges of the Surabaya District Court in the case of an application for an interfaith marriage license using normative juridical techniques. How is the validity of marriage arrangements in accordance with Law Number 1 of 1974 and marriage arrangements based on Islamic law, and how are the considerations of judges in determining interfaith marriages. In the author's view, the judge has explained that there are legal rules that do not accept the validity of interfaith marriages. However, the judge did not consider the implications of interfaith marriage from a philosophical point of view. Law No. 23/2006, which is used as a legal consideration, does not explain the validity of marriage as a component of religious ceremonies to provide legal certainty. The judge's decision in this case was only effective in carrying out the trial program by rejecting religious arguments from religious institutions that could make people less obedient to practicing their religion.

Keywords: Juridical Review, Interfaith marriage, Legal Considerations